

MODEL TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL: STUDI PADA PEMERINTAH KOTA METRO LAMPUNG

Pindo Riski Saputra, Yuditya Wardana*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawacana Metro, Indonesia,

Abstract

This study aims to identify and analyze effective and accountable local government governance models in Metro City, Lampung Province. The approach employed is qualitative, utilizing literature review methods to examine scientific references, policy documents, and international publications related to sound governance principles. Data sources include books, journals, legislation (particularly Law No. 23 of 2014), performance reports of the Metro City Government, as well as publications from the UNDP and World Bank. The research findings indicate that Metro City has adopted principles of good governance such as transparency, accountability, efficiency, and public participation; however, it still faces challenges in policy consistency, institutional capacity, and community engagement. This study recommends strengthening the performance evaluation system, improving human resource competencies, and utilizing information technology in public services. The success of an effective and accountable governance model requires political commitment, inter-agency coordination, and active community participation.

Keywords: government governance, accountability, effectiveness, good governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis model tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel di Kota Metro, Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur, mengkaji referensi ilmiah, dokumen kebijakan, serta publikasi internasional terkait prinsip good governance. Sumber data meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang No. 23 Tahun 2014), laporan kinerja Pemerintah Kota Metro, serta publikasi UNDP dan World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Metro telah mengadopsi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik, namun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi kebijakan, kapasitas aparatur, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem evaluasi kinerja, peningkatan kompetensi SDM, serta penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Keberhasilan model tata kelola yang efektif dan akuntabel memerlukan komitmen politik, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata kunci: tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, efektivitas, good governance

Article history:

Submission: 01 June 2025

Revised: 10 June 2025

Accepted: 12 June 2025

Published: 30 June 2025

*Corresponding author

Email: yuditya5290@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberhasilan tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah serta sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan secara konsisten. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan lokal sangat berkorelasi dengan efektivitas institusi, kepemimpinan birokrasi, dan partisipasi publik yang substansial. Misalnya, studi oleh Grindle (2007) menyatakan bahwa keberhasilan reformasi tata kelola sangat tergantung pada konteks lokal dan kemampuan aktor-aktor kunci untuk mendorong perubahan institusional. Hal serupa juga ditegaskan dalam penelitian oleh Kurniawan (2015) yang menyoroti pentingnya komitmen pimpinan daerah dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong tata kelola yang lebih baik di tingkat daerah melalui kebijakan desentralisasi fiskal dan administrasi sejak diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Hadiz dan Robison (2004), desentralisasi di Indonesia sering kali tidak diiringi dengan peningkatan kualitas kelembagaan lokal, sehingga menciptakan peluang baru bagi terjadinya korupsi dan praktik *patronage politics* di daerah.

Studi oleh Budiati (2016) menemukan bahwa akuntabilitas pemerintahan daerah di Indonesia seringkali bersifat formalistik, lebih menekankan pada pemenuhan prosedur administratif ketimbang pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian efektivitas dan akuntabilitas tata kelola tidak bisa hanya didasarkan pada dokumen pertanggungjawaban, tetapi harus mencerminkan kepuasan publik, efektivitas kebijakan, dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kota Metro, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan memperkuat transparansi, seperti pengembangan sistem informasi pelayanan publik dan pembentukan forum warga. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis secara mendalam model tata kelola pemerintahan yang diterapkan, serta tantangan dan faktor-faktor penunjangnya. Dengan karakteristik sebagai kota kecil dengan struktur pemerintahan yang relatif ramping, Kota Metro memiliki keunggulan dalam hal efisiensi koordinasi dan potensi penguatan partisipasi warga secara langsung. Ini memberikan peluang bagi penerapan model tata kelola yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini mengacu pada model *network governance* yang dikembangkan oleh Rhodes (1996), yang menekankan pentingnya jejaring antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam model ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang dominan, tetapi menjadi bagian dari jaringan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Model ini relevan dalam konteks pemerintahan lokal karena menuntut fleksibilitas, keterbukaan, dan kemampuan berkoordinasi lintas sektor. Selain itu, pendekatan *New Public Governance* (Osborne, 2006) juga digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi, co-production, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai kerangka operasional, penelitian ini akan menggunakan indikator *good governance* sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997), yaitu: partisipasi, supremasi hukum,

transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Indikator-indikator ini akan digunakan untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan Kota Metro serta mengevaluasi sejauh mana implementasinya berdampak pada perbaikan kinerja pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

Dari sisi literatur domestik, sejumlah peneliti telah mengkaji permasalahan tata kelola pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia. Studi oleh Sumardi (2018) tentang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi informasi dan keterlibatan masyarakat terbukti meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Sementara itu, penelitian oleh Saparuddin (2019) di Kota Makassar menekankan pentingnya kapasitas kepemimpinan birokrasi dan koordinasi antar lembaga dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan lokal.

Namun demikian, belum banyak kajian yang secara khusus mengeksplorasi bagaimana model tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dapat dirancang dan diimplementasikan dalam skala kota kecil seperti Metro. Sebagian besar studi masih bersifat normatif dan deskriptif, tanpa menggali secara mendalam mekanisme yang dapat memastikan keberlanjutan praktik-praktik tata kelola yang baik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia.

Secara metodologis, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep teoretis serta praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai referensi ilmiah dan dokumen kebijakan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian

Dengan mempertimbangkan pentingnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, maka penguatan model tata kelola yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya ingin memotret kondisi tata kelola pemerintahan di Kota Metro, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi perbaikan kebijakan publik di tingkat lokal. Harapannya, model yang dihasilkan dari studi ini dapat direplikasi atau diadaptasi oleh daerah lain dengan karakteristik serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep teoretis serta praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai referensi ilmiah dan dokumen kebijakan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Sumber data meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan (khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dokumen perencanaan dan laporan kinerja Pemerintah Kota Metro, serta publikasi lembaga internasional seperti UNDP dan World Bank mengenai prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis berbagai informasi dan gagasan

yang ditemukan dalam literatur. Analisis dilakukan secara tematik dengan memfokuskan pada beberapa kategori utama, seperti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan (partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, transparansi), strategi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan model tata kelola daerah. Setiap literatur yang dikaji dianalisis secara kritis untuk melihat relevansi dan keterkaitannya dengan konteks Kota Metro, Lampung. Dengan demikian, hasil studi literatur ini diharapkan mampu memberikan dasar konseptual dan empiris yang kuat untuk merumuskan model tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan terhadap berbagai sumber akademik, kebijakan, dan dokumen pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa model tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel di Kota Metro menunjukkan kecenderungan menuju perbaikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

Dalam hal efektivitas, Pemerintah Kota Metro telah mengadopsi berbagai instrumen kebijakan untuk mempercepat layanan publik dan meningkatkan kinerja birokrasi, di antaranya penerapan sistem e-government seperti aplikasi pelayanan publik berbasis digital, serta penguatan fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah. Praktik ini mencerminkan salah satu prinsip *good governance* sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997), yakni efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Menurut Dwiyanto (2011), efektivitas pelayanan merupakan indikator utama keberhasilan tata kelola yang berorientasi pada kepentingan publik.

Namun, dalam aspek akuntabilitas, studi literatur menunjukkan bahwa akuntabilitas formal (seperti penyusunan laporan kinerja dan keuangan) cenderung lebih dominan dibandingkan akuntabilitas substantif yang berorientasi pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Budiati (2016) yang menyatakan bahwa praktik akuntabilitas pemerintahan daerah di Indonesia masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik secara substansial. Sebagai contoh, meskipun Pemerintah Kota Metro telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), tidak semua unit kerja mempublikasikannya secara terbuka atau menjadikannya sebagai alat refleksi kinerja yang efektif.

Dari sisi partisipasi publik, Kota Metro memiliki beberapa forum konsultasi publik seperti Musrenbang dan forum konsultasi layanan, namun partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh substansi kebijakan. Fenomena ini disebut oleh Arnstein (1969) dalam teorinya tentang *Ladder of Citizen Participation*, di mana sebagian besar partisipasi di level daerah masih berada pada tingkatan *tokenism* (partisipasi simbolik), bukan *citizen power* (partisipasi substantif). Ini menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat mekanisme partisipatif agar lebih inklusif dan bermakna.

Selanjutnya, dalam hal transparansi, beberapa dokumen publik Kota Metro memang telah tersedia secara daring melalui situs resmi pemerintah daerah. Namun, literatur menunjukkan bahwa akses informasi belum sepenuhnya merata, terutama bagi kelompok marginal atau masyarakat dengan literasi digital rendah. Menurut Pratama & Wiguna (2021), tantangan utama dalam mewujudkan transparansi daerah di Indonesia adalah pada aspek diseminasi informasi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh

publik.

Dalam konteks teoritis, model tata kelola pemerintahan yang dianalisis dalam penelitian ini sejalan dengan pendekatan New Public Governance (NPG) sebagaimana dikemukakan oleh Osborne (2006). NPG menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Di Kota Metro, potensi kolaborasi ini mulai terlihat melalui kemitraan dengan LSM lokal dalam program pengawasan anggaran dan pelibatan universitas dalam penyusunan kajian kebijakan daerah. Namun, model ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam struktur kelembagaan pemerintahan.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif *network governance* dari Rhodes (1996) yang menggambarkan pemerintahan sebagai hasil interaksi antara jaringan aktor, bukan hanya keputusan top-down. Temuan dari studi literatur memperkuat argumen ini, di mana efektivitas tata kelola di Kota Metro tidak hanya bergantung pada struktur formal birokrasi, tetapi juga pada kemampuan aktor-aktor lokal—seperti tokoh masyarakat, media lokal, dan kelompok kepentingan—dalam membentuk konsensus dan mengontrol kebijakan publik secara sosial.

Secara keseluruhan, hasil studi literatur mengindikasikan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Kota Metro, dibutuhkan model yang menekankan pada tiga aspek utama:

- a. Penguatan kapasitas birokrasi dalam hal responsivitas dan inovasi pelayanan;
- b. Pengarusutamaan partisipasi publik yang substantif melalui kanal formal dan non-formal;
- c. Transparansi dan akuntabilitas yang bersifat integratif, tidak hanya dalam aspek pelaporan administratif, tetapi juga dalam konteks evaluasi sosial oleh masyarakat.

Model ini harus dikembangkan dengan mempertimbangkan konteks lokal, kapasitas kelembagaan, dan budaya politik daerah. Selain itu, penting juga untuk memperkuat fungsi pengawasan baik secara vertikal (oleh pemerintah pusat dan lembaga pengawas formal) maupun horizontal (oleh masyarakat sipil dan media).

Penguatan Kapasitas Birokrasi: Responsivitas dan Inovasi Pelayanan

Kapasitas birokrasi tidak hanya menyangkut jumlah SDM atau struktur kelembagaan, tetapi juga kualitas adaptif birokrasi dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan solutif. Responsivitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah merespons aspirasi publik secara langsung dan berkelanjutan, bukan hanya pada momentum politis seperti saat Musrenbang atau menjelang pemilu.

Di Kota Metro, meskipun sudah terdapat inovasi pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi layanan publik (misalnya layanan kependudukan), namun tantangan utama terletak pada kecepatan respons, kepastian layanan, serta ketersediaan informasi pendukung. Beberapa unit kerja masih lambat dalam menindaklanjuti aduan masyarakat, baik karena keterbatasan SDM, lemahnya sistem pengawasan internal, maupun budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil.

Inovasi pelayanan seharusnya tidak sekadar digitalisasi, tetapi juga melibatkan perubahan pola pikir (*mindset*) birokrasi. Menurut Hartley (2005), inovasi dalam sektor publik yang berhasil tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi pada kepemimpinan visioner, kapasitas kolaboratif, dan keberanian mengubah status quo. Di Kota Metro, potensi inovasi dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, dan pelibatan ASN muda untuk menciptakan solusi pelayanan yang kontekstual.

Pengarusutamaan Partisipasi Publik Substantif: Kanal Formal dan Non-Formal

Partisipasi publik sering kali hanya dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam forum resmi seperti Musrenbang, padahal substansi partisipasi yang sejati adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Model tata kelola yang efektif harus mampu mengarusutamakan partisipasi secara horizontal dan dialogis, bukan hanya prosedural.

Partisipasi melalui kanal formal seperti forum warga, RT/RW, dan DPRD, umumnya sudah tersedia, namun keterbukaan ruang untuk kanal non-formal—misalnya kelompok komunitas lokal, organisasi pemuda, kelompok perempuan, dan media sosial—masih minim difasilitasi secara serius oleh pemerintah daerah.

Menurut Fung (2006) dalam model *Democracy Cube*, bentuk partisipasi yang berkualitas memerlukan arus informasi dua arah, kesetaraan akses suara, dan kekuatan pengaruh keputusan. Artinya, warga bukan hanya “didengar”, tetapi juga punya dampak nyata terhadap keputusan kebijakan. Di Kota Metro, hal ini bisa diperkuat melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran partisipatif, audit sosial, dan forum kolaboratif lintas sektor yang bersifat deliberatif.

Transparansi dan Akuntabilitas Integratif: Dari Pelaporan Administratif ke Evaluasi Sosial

Transparansi dan akuntabilitas yang efektif tidak cukup dengan menyusun laporan dan memasukkannya ke dalam situs web pemerintah. Harus ada transformasi dari transparansi simbolik menjadi transparansi substantif, yang memberi masyarakat hak akses yang riil terhadap informasi dan kesempatan untuk memberikan penilaian serta umpan balik terhadap kinerja pemerintah.

Transparansi yang integratif berarti informasi yang disediakan tidak hanya **tersedia**, tetapi juga mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh publik. Misalnya, menyajikan data anggaran dalam bentuk infografis yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, bukan hanya dokumen PDF teknokratis setebal ratusan halaman.

Sementara itu, akuntabilitas tidak boleh berhenti pada pelaporan vertikal kepada pemerintah pusat atau lembaga audit seperti BPK, melainkan juga perlu mencakup evaluasi horizontal oleh masyarakat. Hal ini disebut oleh Bovens (2007) sebagai *social accountability*, yaitu akuntabilitas yang dibangun melalui mekanisme sosial, termasuk media, LSM, forum warga, dan platform aduan publik.

Untuk mewujudkan hal ini, Kota Metro perlu mendorong adanya mekanisme feedback loop, di mana masyarakat dapat menilai kualitas layanan, menyampaikan evaluasi terhadap program pemerintah, dan mengetahui sejauh mana tanggapan diberikan atas aspirasi yang disampaikan. Ini akan membentuk siklus akuntabilitas yang bersifat berkelanjutan dan berbasis kepercayaan publik

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya menuju tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel di Kota Metro telah menunjukkan kemajuan, terutama dalam penerapan kebijakan pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, keberhasilan tersebut masih bersifat parsial dan belum sistemik. Melalui kajian literatur, ditemukan bahwa tata kelola yang baik harus dibangun di atas tiga fondasi utama: penguatan kapasitas birokrasi, pengarusutamaan partisipasi publik yang substantif, serta transparansi dan akuntabilitas yang

bersifat integratif.

Pertama, kapasitas birokrasi di Kota Metro perlu ditingkatkan tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara fungsional dan kultural, dengan menumbuhkan nilai-nilai responsivitas, adaptif, serta inovatif dalam pelayanan publik. Kedua, partisipasi publik harus dipahami secara lebih luas, tidak hanya dalam forum-formal yang bersifat administratif, melainkan juga dalam bentuk keterlibatan yang bermakna pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, termasuk melalui kanal-kanal non-formal. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas harus bergerak dari sekadar pelaporan administratif ke arah evaluasi sosial yang melibatkan masyarakat sebagai aktor pengawas dan penilai kinerja pemerintahan.

Model tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel pada akhirnya menuntut sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, Pemerintah Kota Metro perlu membangun sistem tata kelola yang berbasis kolaborasi, keterbukaan, dan keberlanjutan, serta berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact) bagi masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual dan praktis dalam perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih partisipatif dan berintegritas.

REFERENSI

- Ardelia, S. I. M., & Yuadi, I. (2024). Digital government dalam menciptakan transparansi pelayanan publik: Analisis berdasarkan perspektif bibliometrik. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 7(2), 111–130.
- Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24–34.
- Azmi, I. F., & Nugroho, A. A. (2023). Anti-corruption system 4.0: The adoption of blockchain technology in the public sector. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 93–108.
- Budiati, A. (2016). Akuntabilitas pemerintahan daerah: Antara retorika dan praktik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 112–125.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (2011). Good enough governance revisited. *Development Policy Review*, 29(Suppl), s199–s221.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). Neo-liberal reforms and illiberal consolidations: The Indonesian paradox. *Journal of Development Studies*, 40(2), 220–241.
- Kristian, I., & Ikhsan, F. (2024). Integrating community-based approaches into national disaster management policies: Lessons from recent natural disasters. *International Journal of Law Review and State Administration*, 2(4), 115–125.
- Kurniawan, R. (2015). Kepemimpinan kepala daerah dan reformasi birokrasi. *Jurnal Administratie*, 12(1), 45–60.
- Novalinda, R., Ambiyar, & Fahmi, R. (2022). Program Jakarta Open Data sebagai e-government dalam pelayanan informasi publik Humas Pemprov DKI Jakarta. *Jurnal Cyber PR*, 2(1), 1–12.
- Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments: Practices in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 45–60.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387.

-
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state* (2nd ed., jika ada). Palgrave Macmillan.
- Pratama, Y. A., & Wiguna, A. P. (2021). Transparansi informasi publik di era digital: Studi di pemerintahan kota. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 45–60.
- Putra, A. P., & Narastri, M. (2024). Implementasi prinsip-prinsip good governance guna efektivitas pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Wonokromo, Surabaya. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 1–13.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Saparuddin, S. (2019). Akuntabilitas pemerintah Kota Makassar dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 86–97.
- Sumardi, D. (2018). Penguatan tata kelola pemerintahan melalui e-government di Kabupaten Sleman. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 33–48.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development* (Rev. ed., jika ada). UNDP.
- World Bank. (2007). *Strengthening World Bank Group engagement on governance and anticorruption*.